

PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI USAHA PARTAI POLITIK MENYEMAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN KEORGANISASIANNYA*POLITICAL EDUCATION AS AN ATTEMPT BY POLITICAL PARTIES TO SOW PANCASILA VALUES IN THEIR ORGANIZATIONAL LIFE***Arif Prasetyo Wibowo*, Nurbani Yusuf**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Malang
Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang 65144, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 05 Desember 2021

Disetujui : 11 Juli 2022

Keywords:

political education, political parties, Pancasila values

Kata Kunci:

pendidikan politik, partai politik, nilai-nilai Pancasila

***) Korespondensi:**

E-mail: arifpwibowo@umm.ac.id

Abstract: this study aimed to describe the meaning of political education for political parties, the relationship between the party platform and Pancasila values, approaches, media, and methods used by political parties in political education, as well as obstacles and efforts of political parties in the implementation of political education. This study used a qualitative approach with a comparative study method. Data was collected using interviews, observation, and documentation studies. Political education carried out by political parties to their cadres was interpreted as an educational effort to improve the quality of human resources. The platform of political parties was a reflection of the values of Pancasila. The approaches, methods, and media parties used in political education were diverse. Obstacles and efforts of political parties in implementing political education, including funding and attendance of members, were resolved by making donations and completing the results of the minutes of each meeting.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna pendidikan politik bagi partai politik, kaitan antara platform partai terhadap nilai-nilai Pancasila, pendekatan, media, dan metode yang digunakan partai politik dalam pendidikan politik, serta hambatan dan upaya untuk menanganinya dalam pelaksanaan pendidikan politik. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya dimaknai sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Platform partai politik merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Pendekatan, metode, dan media yang digunakan oleh partai dalam melakukan pendidikan politik cukup beragam. Hambatan dan upaya partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik meliputi pendanaan dan kehadiran anggota diselesaikan dengan mengadakan sumbangan serta hasil notulensi setiap pertemuan.

PENDAHULUAN

Kehidupan partai politik sejatinya telah erat dengan masyarakat Indonesia. Partai politik sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri menjadi wadah perjuangan dalam menggelorakan semangat nasionalisme. Partai politik memiliki peranan yang sangat penting sebagai pilar demokrasi (Setyadarmodjo, 2000). Partai politik dipandang memiliki legitimasi dalam

membentuk landasan demokratis masyarakat. Fungsi demokratisasi yang menjadi kewajiban dari partai politik salah satunya melakukan pendidikan politik (Rahman & Suharno, 2019). Partai politik memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Partai politik menjadi salah satu pilar utama kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang harus terus berproses dalam menjalankan

amanat sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa partai politik telah menerima bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam menyelenggarakan pendidikan politik (Hermawan, 2020). Pemerintah harus membuat pedoman dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan gubernur, atau peraturan walikota/bupati yang standarisasinya bisa dibuat oleh lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan agar anggaran dari APBN/APBD efektif digunakan untuk pendidikan politik yang benar.

Efektifitas pendidikan politik belum teruji dikarenakan pemahaman yang sangat kurang dan tidak adanya pertanggungjawaban untuk substansinya. Permasalahan pendidikan politik seharusnya diperhatikan secara khusus karena berkaitan dengan kepentingan nasional dan demokrasi. Partai politik dalam perkembangannya hanya fokus dalam perebutan kekuasaan sehingga mengabaikan fungsinya sebagai wahana pendidikan politik rakyat (Wibowo, 2020). Partai politik belum menjadikan pendidikan politik sebagai sorotan utama sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi politik (Ridha & Riwanda, 2020). Tata kelola partai politik yang belum ideal menjadi penyebab tidak efektifnya pendidikan politik.

Pendidikan politik yang harus dijalankan oleh partai politik tidak dibahas dengan jelas pada masa Orde Baru kecuali dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda. Pendidikan politik baru digalakkan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Tahun 2009. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa partai politik berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada para kader dan masyarakat. Urgensi pelaksanaan pendidikan politik juga dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik berfungsi mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, serta meningkatkan persatuan. Pelaksanaan pendidikan politik

kepada aparaturnegara dan masyarakat menjadi tanggung jawab partai politik.

Pendidikan politik memiliki dua makna dalam artian luas dan sempit. Pendidikan politik dalam arti luas menjadi bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak akan dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik pemerintah atau masyarakat. Pendidikan politik dalam arti sempit yaitu usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat agar menghayati dan memahami nilai-nilai dalam suatu sistem politik yang ideal (Alfian, 1986). Pendidikan politik yang diberikan kepada kader merupakan upaya untuk menyemai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan organisasinya (Wibowo & Darmawan, 2021). Nilai-nilai Pancasila tidak boleh diabaikan dalam upaya pengkaderan partai politik. Memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sangat fundamental dalam organisasi maupun untuk kepentingan umum.

Setiap partai politik harus dapat memfasilitasi pendidikan politik dalam proses pengkaderan partai. Sistem pengkaderan partai dalam perkembangannya ditemukan berbagai persoalan sehingga belum mampu untuk maksimal dalam menyemai nilai-nilai Pancasila. Permasalahan yang terjadi dalam sistem pengkaderan partai dapat berimplikasi pada kinerja kader dalam organisasi maupun bagi masyarakat (Masriyani & Yanti, 2019). Pendidikan politik dalam sistem pengkaderan partai politik sebelumnya telah cukup masif dibahas. Penanaman secara kompleks nilai-nilai Pancasila menjadi aspek kuat dalam pengkaderan (Oesman & Alfian, 1991). Nilai-nilai Pancasila diyakini sebagai dasar para kader dalam berorganisasi sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan politik pada dasarnya merupakan suatu aspek yang memiliki *urgensi* tinggi dalam setiap organisasi kepartaian. Kajian ini memfokuskan pada persoalan pendidikan politik dalam sistem pengkaderan Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Jawa Barat. Pendidikan politik yang diberikan kepada para kader seharusnya dapat berjalan maksimal. Pelaksanaan pendidikan

politik harus diiringi dengan pemahaman dasar kebangsaan karena DPD PDIP dan DPW PKS Jawa Barat memiliki platform atau metode yang berbeda. Pemahaman dasar kebangsaan dapat diimplementasikan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan organisasinya (Soedarso, 2006). Pengkajian dan pemaknaan nilai-nilai Pancasila secara kuat dan mendalam menjadikan setiap kader dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Sistem kelembagaan dalam partai harus dimuat secara jelas pada regulasi sebagai upaya mencegah terjadinya persoalan dari berbagai partai politik di Indonesia. Dampak tidak adanya regulasi terkait sistem kelembagaan dalam partai politik berpengaruh pada proses pembentukan kader yang menggunakan pemahaman monolitik berdasarkan ideologi partai (Imansyah, 2012). Nilai-nilai Pancasila yang belum mampu dimaknai secara mendalam menjadi faktor pendorong timbulnya persoalan pengkaderan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) makna pendidikan politik bagi partai politik, (2) implikasi platform partai terhadap nilai-nilai Pancasila, (3) pendekatan, metode, dan media yang digunakan partai politik dalam pendidikan politik, serta (4) hambatan dan upaya yang dilakukan partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode studi komparatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan peristiwa sesungguhnya (Ummatin, 2020). Kajian ini berusaha untuk mengetahui pola dan *platform* pendidikan politik antara DPD PDIP dan DPW PKS Provinsi Jawa Barat. Studi komparatif merupakan suatu bentuk penelitian dengan membandingkan antara variabel yang saling memiliki kausalitas dengan mengemukakan perbedaan atau persamaan dalam sebuah kebijakan (Zuryani, Ranteallo, & Kebayantini, 2016). Penggunaan metode kualitatif dengan studi komparatif mampu menjadi dasar analisis rasional sehingga memberikan simpulan yang relevan. Sumber data dalam kajian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pimpinan partai, kader partai, serta akademisi. Data sekunder diperoleh dari media cetak dan media elektronik. Teknik pengumpulan

data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Pendidikan Politik bagi Partai Politik

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik merupakan suatu kegiatan edukatif. DPD PDIP Jawa Barat melakukan proses pendidikan politik kepada para kadernya melalui tiga jenjang administrasi yaitu kaderisasi tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat utama atau nasional. DPW PKS Jawa Barat melakukan enam jenjang administrasi pendidikan politik yang harus diikuti oleh para kader yaitu kaderisasi anggota pemula, anggota muda, anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli, dan anggota purna. Pendidikan politik dilakukan oleh partai politik secara sistematis, berjenjang, dan berkesinambungan (Sunatra, 2016). Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para kader terhadap orientasi nilai-nilai perjuangan organisasinya

Hakikat pendidikan politik bagi PDIP merupakan salah satu fungsi dari partai politik. Masyarakat diwajibkan memahami politik dengan menggunakan prinsip-prinsip Pancasila. PKS memaknai pendidikan politik sebagai dasar kehidupan partai. PKS yang merupakan partai dakwah memaknai pendidikan politik mampu mencetak kader-kader yang handal dan saling bertaut untuk memberdayakan umat. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya merupakan bagian dari pendidikan sosial pada umumnya (Ruslan, 2000). Kegiatan pendidikan politik kepada para kader merupakan upaya edukatif yang intensional, disengaja, dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moral mencapai tujuan-tujuan politik (Kartono, 2009). Pendidikan politik berfungsi membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan politik.

Setiap jenjang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai memberikan manfaat kepada para kader untuk mendapatkan pengetahuan serta pengalaman baru dalam dunia politik. Para kader setelah mengikuti pendidikan politik mendapatkan kesadaran dan pemahaman baru mengenai arti penting berkontribusi dalam

kegiatan politik (Rahman & Sunarno, 2019). Para kader dalam pelaksanaan praksis mengerti dan memahami tugas yang harus dilakukan dalam terlibat aktif di kegiatan politik. Kontribusi aktif dalam kegiatan politik menjadi bekal utama para kader dalam mensosialisasikan kembali nilai-nilai yang didapatkannya kepada masyarakat (Wibowo, 2020). Pendidikan politik merupakan pendidikan sosial yang menuntut seseorang atau masyarakat harus memperoleh informasi serta pengetahuan mengenai nilai-nilai keyakinannya dan sesuai dengan sistem politik.

Proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman berbeda-beda dalam setiap jenjang kaderisasi. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan baik secara rutin dalam pertemuan tiap minggu oleh DPW PKS Jawa Barat atau secara periodik setahun sekali oleh DPD PDIP Jawa Barat sebagai upaya perubahan cara berpikir dan peningkatan partisipasi kader. Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PDIP dan DPW PKS Jawa Barat termasuk dalam artian sempit yaitu sebagai usaha sadar agar para kader menghayati dan memahami nilai-nilai dalam suatu sistem politik. Kontribusi para kader dalam proses sosialisasi kepada masyarakat termasuk dalam artian luas yaitu melakukan perubahan langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari (Alfian, 1986). Proses pendidikan politik yang berbeda-beda tetap memiliki tujuan akhir sama yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkarakter sesuai dengan watak partainya masing-masing.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik bertujuan untuk memperbaiki sistem. Proses pendidikan politik oleh DPD PDIP berfungsi sebagai media pembaharuan rumusan dan penyebarluasan ideologi, teori pergerakan, dan taktik perjuangan partai. Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PDIP juga sebagai media adaptasi rancangan kebijakan negara yang sejalan dengan Trisakti ajaran Bung Karno dan terjalinnya hubungan antara kader dengan masyarakat. Fungsi pendidikan politik oleh DPW PKS Jawa Barat yaitu penyebaran kader aktivis dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat agar menerima menerima manhaj Islam sebagai produk kebijakan publik serta mempengaruhi, merumuskan, dan menerjemahkan konsep kebijakan publik dengan nilai-nilai keislaman (Wibowo & Darmawan,

2021). Pendidikan politik oleh partai politik dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan visi misi setiap partai.

Warga negara yang memiliki pemahaman nilai-nilai politik akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Pendidikan politik dapat berkembang melalui lembaga formal dan informal yaitu keluarga, sekolah, partai-partai politik, media massa (Ruslan, 2000). Berdirinya partai politik dalam suatu masyarakat merupakan media pendidikan politik yang sesungguhnya. Pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai lembaga formal dan informal memberikan pemahaman warga negara untuk mengubah realitas politik ke dalam sistem yang ideal sesuai arah pembangunan bangsa yang ditandai dengan kebudayaan politik baru (Soeprapto, Nugrahajati, & Suparno, 2015). Peran partai politik menjadi lebih besar selain sebagai alat pemilihan umum yaitu menentukan serta mengartikulasikan sikap politik bagi warga negara.

Platform Partai sebagai Cerminan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Politik

DPD PDIP Jawa Barat dalam memberikan pendidikan politik kepada para kader menjelaskan secara keseluruhan proses bangsa Indonesia dalam menemukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. PDIP menjadikan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai asas perjuangan partai, dengan jati diri kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial serta watak gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah, dan progresif revolusioner (Wibowo, 2020). PDIP dalam kehidupan organisasinya tidak pernah membedakan antara Pancasila 1 Juni 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945. PDIP menjadikan Pancasila sebagai jiwa perjuangan partai.

PDIP dalam praksisnya menjadikan Trisakti ajaran Bung Karno sebagai pedoman perjuangan program kerja partai untuk mewujudkan cita-cita nasional. Trisakti ajaran Bung Karno dalam mata ajar yang diberikan DPD PDIP kepada para kader dibagi menjadi tiga pembahasan yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya (Wibowo, 2020). Pemberian mata ajar dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PDIP Jawa Barat diberikan oleh guru kader di Dewan Pimpinan Pusat. Hal ini berbeda dengan PKS yang melakukannya dengan dakwah, pendidikan, ekonomi, dan

sosial-kemasyarakatan. DPW PKS menjadikan Islam sebagai asas perjuangan partai dengan tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam konteks negara Indonesia.

DPW PKS menggunakan Islam sebagai asas perjuangan dikarenakan umat Islam turut andil dan berkontribusi besar dalam pergulatan sejarah mendirikan negara Indonesia. Proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta wawasan kebangsaan para kader. DPW PKS Jawa Barat juga sering melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan materi tambahan terkait wawasan kebangsaan. DPW PKS Jawa Barat mengakui bahwa terdapat beberapa kader tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara karena dipengaruhi oleh sejarah sebelum berdirinya PKS yang sekarang. Pancasila dianggap oleh sebagian para kader sebagai *thogut* yang memiliki arti menyembah Tuhan selain Allah (Wibowo & Darmawan, 2021). Para kader yang tergabung dalam kelompok anti Pancasila menganggap bahwa PKS sebagai partai *thogut* karena memasukkan Pancasila ke dalam AD/ART.

DPD PDIP dan DPW PKS Jawa Barat harus tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara disamping platform partai. PDIP dan PKS merupakan partai politik doktriner yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai pencapaian ideologi (Djuyandi, 2014). Ideologi partai merupakan ide mengenai masyarakat, negara, dan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dan diperjuangkan terus menerus oleh organisasinya (Setyadarmodjo, 2000). Ideologi partai merupakan seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan dengan diawasi secara ketat oleh aparat partai (Surbakti, 2007). Pergantian kepemimpinan tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara konkret dan terorganisasikan secara ketat.

Platform partai dengan ideologi Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan antara platform partai dengan Pancasila diukur melalui tiga dimensi meliputi realita, idealisme, dan fleksibilitas (Oesman & Alfian, 1991). Dimensi realita memberikan makna bahwa ideologi bersumber dari nilai-nilai yang nyata hidup di

dalam masyarakat sehingga para kader dapat merasakan dan menghayati. Dimensi idealisme memberikan makna bahwa suatu ideologi harus mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Idealisme atau cita-cita dalam ideologi yang dihayati suatu masyarakat atau bangsa memberikan arah dalam membangun kehidupan bersama. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan hanya dimiliki secara wajar oleh suatu ideologi yang terbuka karena bersifat demokratis. Ideologi terbuka dapat memelihara dan memperkuat relevansinya dari perkembangan pemikiran-pemikiran baru.

Setiap partai politik memiliki platform yang berbeda dalam memberikan pendidikan politik. Platform yang dimiliki oleh setiap partai politik merupakan sebuah usaha berpikir secara rasional, sistematis, radikal, komprehensif, dan universal tentang segala sesuatu (Soedarso, 2006). Platform yang dimiliki oleh partai politik merupakan pondasi awal dalam membentuk sistem kehidupan kepartaian. Sistem kepartaian merupakan kumpulan dari komponen-komponen baik fisik atau non-fisik yang berhubungan dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu (Yuen & Leung, 2009). Platform yang digunakan oleh partai politik wajib mendudukkan Pancasila ke dalam AD/ART untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD NRI 1945. Platform partai politik mempengaruhi proses perwujudan cita-cita nasional.

Pelaksanaan Pendidikan Politik sebagai Usaha Menyemai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Keorganisasiannya

Partai politik dalam melaksanakan program pendidikan politik memiliki pendekatan, metode, dan media untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para kadernya. Pendekatan, metode, dan media yang digunakan oleh DPD PDIP dan DPW PKS Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk memberikan pemahaman yang ideal mengenai arah dan tujuan berdirinya partai politik. Partai politik dalam menggunakan pendekatan, metode, dan media harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dalam organisasinya (Wibowo, 2020). Pendekatan, metode, dan media dalam menunjang pendidikan politik penting dilakukan oleh setiap partai politik agar memiliki kesamaan gerak langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pendidikan politik bertujuan membentuk pewarisan kebudayaan dari generasi ke generasi. Pendidikan politik pada akhirnya akan berhubungan dengan pembangunan politik dalam kebudayaan bangsa (Egeten, 2015). Pendidikan politik berkaitan dengan pembudayaan sistem politik yang dilandasi norma dasar dalam ideologi nasional dan konstitusi negara melalui kelembagaan secara sistematis dan terintegrasi (Sunatra, 2016). Proses pembudayaan politik secara normatif dan praktis dikembangkan berdasarkan komponen-komponen yang berlaku dalam tatanan nilai sosial budaya dan pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*).

Pendekatan, metode, dan media yang digunakan dalam pendidikan politik merupakan pelaksanaan dari rekrutmen partai politik dalam menjalankan fungsinya. Rekrutmen partai politik menjadi suatu kebutuhan yang perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan serta kelestarian partai politik. Rekrutmen partai politik menjadi sarana internal partai dalam meningkatkan sumber daya kader. Pendekatan yang dilakukan oleh partai politik dalam melakukan rekrutmen partai sebagai kelompok pertama yang melakukan penyadaran (Berger, 1997). Kelompok pertama yang menumbuhkan kesadaran memiliki pengaruh kuat bagi individu. Kelompok pertama berperan penting dalam mobilisasi perilaku politik karena sebagai pengambil keputusan. Partai politik merupakan organisasi yang menjadi titik transmisi dalam komunikasi politik.

Partai politik dalam momentum pemilihan pimpinan partai memiliki banyak kader yang dapat diseleksi dalam menentukan pilihannya. Partai politik membutuhkan banyak anggota untuk menjaga eksistensinya. Sarana rekrutmen politik sangat berkaitan erat dengan persoalan seleksi kepemimpinan internal partai dan kepemimpinan nasional (Budiardjo, 2008). Setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas sebagai kepentingan internalnya. Partai politik yang memiliki kader berkualitas dapat mengembangkan kesempatan lebih besar dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

Partai politik yang memiliki kader berkualitas tidak kesulitan dalam menentukan atau mengajukan calon untuk masuk ke dalam bursa kepemimpinan nasional. Partai politik dalam menyeleksi kader yang berkualitas

berusaha mendirikan organisasi massa sebagai *underbow* terdiri dari berbagai macam golongan seperti buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan lain sebagainya untuk memperluas kesempatan (Hermawan, 2020). Partai politik juga melakukan berbagai cara melalui kontak pribadi, persuasi, atau cara-cara yang lain untuk mendapatkan kader yang berkualitas (Masriyani & Yanti, 2019). Partai politik membutuhkan sebanyak-banyaknya kader yang berkualitas untuk menjamin keberlangsungan serta kelestarian partai politik dalam menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Pendekatan yang dilakukan oleh setiap partai politik bersifat terbuka yang memperbolehkan masyarakat menjadi kader. Perbedaan pendidikan politik antara partai politik terletak pada asas atau platform partai yang dimilikinya (Su'ud, 2014). PDIP meyakini asas atau platform Pancasila 1 Juni 1945, sedangkan PKS meyakini Islam sebagai platform dalam pendidikan politik. DPD PDIP Jawa Barat melakukan pendekatannya kepada kelompok-kelompok nasionalis seperti sejarah terbentuknya PDIP yang merupakan fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA), Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), serta Partai Katolik. Kelompok selain keluarga besar dari sejarah berdirinya PDIP yaitu masyarakat yang mengerti serta memahami Pancasila dan ajaran Bung Karno. Partai politik yang bersifat terbuka memiliki segmentasinya sendiri dalam melakukan pendekatan pendidikan politik.

DPW PKS Provinsi Jawa Barat sejak awal didirikannya mengusung slogan sebagai partai dakwah. Gerakan dakwah yang dilakukan PKS dibagi menjadi dua yaitu kultural dan struktural. Gerakan dakwah kultural merupakan penyebaran aktivis dakwah ke berbagai kalangan serta lapisan masyarakat agar menerima manhaj Islam sebagai produk kebijakan publik. Gerakan struktural adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai lembaga yang menjadi sumber-sumber kebijakan publik agar para kader dapat mempengaruhi, merumuskan, serta menerjemahkan konsep kebijakan publik dengan nilai-nilai keislaman (Ummatin, 2020). DPW PKS dapat mengelompokkan bagian-bagian dari keanggotaan partainya dengan jelas meliputi masyarakat umum, simpatisan, dan kader PKS.

Dakwah merupakan pendekatan yang dilakukan oleh DPW PKS dalam proses pendidikan politik.

Proses pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PDIP Jawa Barat menggunakan metode ceramah dan role playing. DPD PDIP pada tingkat daerah melakukan proses pendidikan politik dengan kaderisasi tingkat madya dalam waktu tujuh hari enam malam (Wibowo, 2020). Para kader PDIP dalam mengikuti proses pendidikan politik diberikan mata ajar meliputi ideologi partai, kepemimpinan dalam partai politik, standarisasi kesekretariatan partai, organisasi manajemen dan kepemimpinan, sejarah partai politik dan PDIP, pemetaan politik dan stratifikasi sosial, pengantar ideologi Pancasila 1 Juni 1945, manajemen penggalangan massa, AD/ART, piagam perjuangan, haluan perjuangan partai, strategi dan teknik pemenangan pilkada, strategi penggalangan massa I dan II. Para kader harus mengikuti semua kegiatan yang diberikan DPD PDIP dalam proses pendidikan politik.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PDIP juga memberikan mata ajar terkait Trisakti ajaran Bung Karno meliputi berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Para kader setelah mendapatkan pembekalan melanjutkan pada tahap turun kelapangan dengan menggunakan metode role playing. Setiap kader secara berkelompok atau individu di tempatkan bersama masyarakat untuk merasakan, melihat, dan memaknai kehidupan (Zuryani, Rantello, & Kebayantini, 2016). Masyarakat yang dipilih sebagai tempat tinggal oleh para kader PDIP Provinsi Jawa Barat yaitu petani, nelayan, dan buruh. Setiap kader baik secara kelompok atau individu dalam masa tinggal bersama masyarakat diberikan tugas dan harus dilaporkan kembali kepada Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) DPD PDIP untuk dievaluasi.

DPW PKS Jawa Barat menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok dalam melakukan proses pendidikan politik kepada para kadernya. Mata ajar yang diberikan DPW PKS Jawa Barat dalam proses pendidikan politik meliputi falsafah dasar perjuangan PKS, hakikat dakwah, kondisi nasional dan akar permasalahan bangsa di bidang politik, ekonomi, dan sosial, Indonesia yang dicita-citakan, platform bidang politik, platform bidang perekonomian, serta platform bidang sosial budaya. Setiap kader PKS setelah

mendapatkan materi dalam pendidikan politik dibagi kedalam kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari 10 sampai dengan 12 orang anggota. Kelompok belajar PKS dimentori oleh seorang pembimbing dalam pertemuan mingguan untuk melakukan proses kaderisasi lanjutan (Wibowo & Dermawan, 2021). Anggota kelompok belajar diwajibkan membentuk kelompok belajar lain yang dibimbing oleh setiap kader.

Partai politik memiliki metode yang berbeda dalam pelaksanaan pendidikan politik. Metode yang digunakan oleh partai politik dalam proses pendidikan politik membuat para kader memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik dalam masyarakat (Su'ud, 2014). Proses individu terlibat dalam pengembangan dan pembelajaran politik dapat membangun hubungan khusus dengan konteks politik pada wilayah yang ditinggali (Yuen & Leung, 2009). Makna pendidikan politik pada dasarnya berbeda dengan politik. Politik sebagai pemerintahan formal sedangkan pendidikan politik fokus pada pembelajaran agar sistem pemerintahan dapat bekerja dengan ideal. Politik digunakan sebagai penyelesaian konflik sedangkan pendidikan politik mengajarkan kelompok-kelompok kepentingan mengejar tujuannya (Kartono, 2009). Politik berarti operasi kekuasaan sedangkan pendidikan politik menganalisis proses kekuasaan di institusi politik, ekonomi, dan lainnya.

Media yang digunakan oleh DPD PDIP Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan politik yaitu video dan gambar Bung Karno serta Ketua Umum Megawati Sukarnoputri. Penayangan video dan gambar Bung Karno untuk memberikan pemahaman dan pengertian perjuangan, sedangkan gambar dan video Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk mengetahui program yang akan dicapai. DPW PKS Provinsi Jawa Barat menggunakan dakwah melalui media cetak dan elektronik dalam proses pendidikan politik. Sumber dakwah yang diberikan kepada para kader bersumber dari Al Qur'an dan as sunnah terkait aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, ruhiyah, aqliyah, dan jasmaniah. Dakwah DPW PKS bertujuan meneguhkan arti ikhwah sehingga mengarah kepada semua bidang kehidupan masyarakat seperti pendidikan, hukum, sosial, seni, budaya, politik, ekonomi, manajemen, kesehatan, kewanitaan, keluarga, dan bela negara.

Media yang digunakan partai politik dalam proses pendidikan politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik, kesadaran politik, dan kemampuan dalam berpartisipasi politik. Kepribadian politik dapat terbentuk dengan metode-metode sosialisasi atau pendidikan politik (Ruslan, 2000). Pengembangan kepribadian politik dipengaruhi oleh faktor sistem politik yang dilihat dari format dan fungsinya dalam menentukan orientasi-orientasi politik, pengalaman dan hubungan politik, serta kemampuan dan kecakapan-kecakapan khusus. Kesadaran politik dapat dicapai melalui arahan politik secara formal dan non formal, penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan, serta pengajaran politik oleh para pemikir dan pemimpin-pemimpin politik (Pfaff, 2009). Kesadaran politik juga muncul melalui belajar mandiri melalui media massa, buku-buku politik, serta berbagai peristiwa dan perkembangan politik. Kesadaran politik dapat dibentuk melalui dialog-dialog kritis dengan metode *apprenticeship* dan generalisasi.

Partisipasi politik dapat dipengaruhi kultur politik atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik. Karakteristik lingkungan politik dalam masyarakat yang menghormati supremasi hukum dan kebebasan politik, menganut sistem politik multipartai, serta mengakui hak kritik dan partisipasi rakyat akan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara (Alfian, 1986). Partisipasi politik dalam faktor personal dibagi menjadi tiga meliputi tingkat perhatiannya, kemampuan dan kecakapan yang dimiliki oleh individu, keyakinan individu akan kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah (Ridha & Riwanda, 2020). Kemampuan dalam berpartisipasi politik para kader dipengaruhi oleh pengalaman politiknya.

Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Partai Politik untuk Mengatasinya dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya tidak dapat berjalan dengan efektif. Pendidikan politik yang tidak dapat dilaksanakan dengan efektif dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Rahman & Suharno, 2019). Hambatan yang dihadapi oleh DPD PDIP Provinsi Jawa Barat yaitu pendanaan kegiatan

kaderisasi, sedangkan PKS meliputi pendanaan dan ketidakhadiran anggota dalam majelis-majelis setiap minggunya. Para kader PKS banyak yang tidak hadir pada saat monitoring setelah proses kaderisasi dilaksanakan secara formal. Hambatan yang dihadapi oleh partai politik dalam melaksanakan program pendidikan politik kepada para kadernya meliputi masalah pendanaan dan ketidakhadiran anggota dalam mengikuti kegiatan secara intens.

Partai politik melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pendidikan politik. Upaya DPD PDIP dalam mengatasi hambatan pendanaan yaitu mengadakan sumbangan gotong royong kepada setiap kader untuk menjaga eksistensi ajaran Bung Karno dan Pancasila 1 Juni 1945 serta pengembangan ideologi yang dilakukan. Upaya DPW PKS dalam menghadapi permasalahan pendanaan yaitu setiap pertemuan mingguan majelis dilakukan infaq untuk kelancaran proses kaderisasi, sedangkan anggota yang tidak hadir disosialisasikan hasil notulensi pada setiap pertemuan melalui sambungan telepon. Hal ini dilakukan agar pembimbing mengulangi pembahasan pada proses mentoring sehingga kader mengetahui permasalahan yang diangkat. Upaya yang dilakukan oleh DPD PDIP dan DPW KPS membuat para kader memahami dan mengerti tujuan pemberian materi pada proses pendidikan politik.

Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh partai politik sebagai bentuk menjaga eksistensi pendidikan politik. Partai politik berfungsi sebagai tahap pendidikan lanjutan bahkan tingkat akhir dari proses pendidikan politik di persekolahan (Sunatra, 2016). Penyelenggaraan pendidikan politik merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh partai politik. Pendidikan politik sebenarnya memberikan pengaruh besar terhadap proses demokratisasi yang sedang berlangsung (Kartono, 2009). Warga negara dapat menggalang komunitas politik yang modern melalui prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi, serta berlandaskan hukum formal dari semua rakyat dan struktur kemasyarakatan. Partai politik dapat dijadikan sebagai wahana para kader dalam mengimplementasikan ilmu politik yang telah dipelajarinya sebagai bentuk perwujudan partisipasi politik.

SIMPULAN

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dimaknai sebagai kegiatan edukatif untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman berbeda-beda dalam setiap jenjang kaderisasi. Platform partai seyogyanya merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila, seperti platform PDIP yaitu Trisakti ajaran Bung Karno, dan platform PKS yaitu dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial-kemasyarakatan. Pendidikan politik yang dilakukan partai politik cukup beragam, di antaranya melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok nasionalis menggunakan metode ceramah dan *role playing* serta media video dan gambar serta melalui pendekatan dakwah dengan metode ceramah dan diskusi serta media cetak dan elektronik. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan politik kepada para kader yaitu pendanaan dan kehadiran anggota. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala berupa sumbangan gotong royong/inafaq serta memperbaiki kelengkapan hasil notulensi setiap pertemuan sehingga kader yang tidak hadir pun dapat mengetahui isu yang dibahas.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian. (1986). *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Berger, K. J. (1997). *The Political Behavior of California Community College Nursing Faculties in Response to Budget Cutbacks, 1982-1987*. California: University of San Diego.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djuyandi, Y. (2014). *Pengantar Ilmu Politik: Suatu Dasar bagi Pemula*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Egeten, M. (2015). Implementasi Budaya Politik serta Pengaruhnya terhadap Pembangunan Politik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(028), 1-12.
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(1), 1-19.
- Imansyah, T. (2012). Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 375-395.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Masriyani, & Yanti, H. (2019). Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 97-109.
- Oesman, O., & Alfian. (1991). *Pancasila sebagai Ideologi: dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Pfaff, N. (2009). Youth Culture as a Context of Political Learning How Young People Politicize Amongst Each Other. *Young: Nordic Journal of Youth Research*, 17(2), 167-189.
- Rahman, A., & Suharno. (2019). Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110-121.
- Ruslan, U. A. M. (2000). *Tarbiyah Siyasiyah Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- Setyadarmodjo, S. (2000). Organisasi Partai Politik dan Demokrasi. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 13(1), 75-84.
- Soedarso. (2006). Pengembangan Sistem Filsafat Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 1(39), 42-56.
- Soeprapto, A., Nugrahajati, D. S., & Suparno, B. A. (2015). Komunikasi dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 39-54.
- Sunatra. (2016). *Pendidikan Politik Kewarganegaraan*. Bandung: Lektas.

- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Su'ud. (2014). Pendidikan Politik dalam Perspektif Piagam Madinah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 21(2), 181-187.
- Ummatin, K. (2020). Demokratisasi dalam Politik Kepartaian Islam. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(1), 19-30.
- Wibowo, A. P. (2020). Upaya Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Pancasila pada Kader. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 33-41.
- Wibowo, A. P., & Darmawan, C. (2021). Peran Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wahana Pendidikan Politik guna Mengembangkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 08(01), 1-9.
- Yuen, T. W. W., & Leung, Y. W. (2009). Political Education: Controversial Issues, Neutrality of Teachers and Merits of Team Teaching. *Citizenship, Social and Economics Education*, 8(2), 99-114.
- Zuryani, N., Ranteallo, I. C., & Kebayantini, N. L. N. (2016). *Peran Program Studi dalam Pendidikan Politik (Studi Komparatif pada FISIP UNUD dan BINUS International)*. Badung: Universitas Udayana.